

## STRATEGI PEMBERDAYAAN PROGRAM *KAREPE DIMESEMI BOJO* PADA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

### *KAREPE DIMESEMI BOJO EMPOWERMENT STRATEGY FOR PEOPLE WITH MENTAL DISABILITY*

Rofi'ah Inggil Pangestu,<sup>1\*</sup> Sri Wibawani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

\*Koresponden email: [inggilrofia1999@gmail.com](mailto:inggilrofia1999@gmail.com)

#### ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya menjadi kota yang ramah disabilitas dan dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Program *Karepe Dimesemi Bojo* (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) adalah terobosan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai strategi pemberdayaan dalam meningkatkan keberfungsian sosial. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan strategi pemberdayaan program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus berdasarkan teori strategi pemberdayaan yaitu : aras mikro, aras mezzo, dan aras makro. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi pemberdayaan program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot cukup berhasil memberdayakan penyandang disabilitas mental. Hal ini dibuktikan : 1) aras mikro, dilakukan dalam bentuk bimbingan, konseling, *crisis intervention*, dan *stress management* secara rutin di Desa Bongkot sebulan dua kali, sehingga cukup berhasil dalam pemberdayaan. 2) aras mezzo, dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan satu bulan sekali dengan fasilitas yang kurang, sehingga kurang berhasil dalam pemberdayaan. 3) aras makro, dilakukan dalam bentuk perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik secara matang dan terbukti nyata memberikan dampak baik pada pelaksanaan program maupun penerima manfaat, sehingga berhasil dalam pemberdayaan.

**Kata kunci:** Strategi, pemberdayaan, disabilitas, kesejahteraan

#### ABSTRACT

*The Jombang Regency Government seeks to become a disability-friendly city and by involving persons with disabilities in social welfare development. The Karepe Dimesemi Bojo Program (Rehabilitation Area for Mentally Disabilities Independent Jombang Regency) is a breakthrough implemented by the Jombang Regency Government as an empowerment strategy in improving social functioning. The purpose of this study was to describe and analyze the success of the Karepe Dimesemi Bojo program empowerment strategy in Bongkot Village, Peterongan District, Jombang Regency. This study uses a qualitative descriptive method with a focus based on the theory of empowerment strategies, namely: micro level, mezzo level, and macro level. The results of the study stated that the empowerment strategy for the Karepe Dimesemi Bojo program in Bongkot Village was quite successful in empowering people with mental disabilities. This is evidenced: 1) at the micro level, carried out in the form of guidance, counseling, crisis intervention, and stress management regularly in Bongkot Village twice a month, so that it is quite successful in empowerment. 2) mezzo level, conducted in the form of skills training once a month with less facilities, so that it is less successful in empowerment. 3) macro level, carried out in the form of policy formulation, social planning, campaigning, social action, lobbying, community organizing and conflict management carefully and proven to have a real impact on program implementation and beneficiaries, so that it is successful in empowerment.*

**Keywords:** Strategy, Empowerment, Disability, Welfare

#### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya dalam meningkatkan kualitas manusia serta masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan memperhatikan tantangan perkembangan global (Hayati & Surya 2020:136). Pada hakekatnya, tujuan dari pembangunan nasional merupakan suatu peningkatan kesejahteraan sosial dengan pemanfaatan

sumber daya di dalamnya (Putra et al., 2020). Kesejahteraan sosial adalah sebagai suatu tata kehidupan serta penghidupan sosial, spiritual dan material yang diikuti oleh rasa keselamatan, ketentaman lahir batin, dan kesusilaan yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan sosial, jasmaniah, dan rohaniah bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak

serta kewajiban manusia sesuai Pancasila (Suharto 2017:2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik jangka panjang. Sehingga hal ini mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan dan menciptakan kesulitan dan hambatan bagi mereka dalam berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak. Disabilitas menurut *World Health Organization* (2011:10) merupakan isu pembangunan. Hal tersebut karena disabilitas memiliki hubungan dengan kemiskinan. Kemiskinan meningkatkan resiko seseorang menjadi penyandang disabilitas karena kekurangan gizi atau penyakit yang tidak bisa diobati karena tidak ada biaya. Oleh karena itu, masyarakat miskin rentan menjadi penyandang disabilitas.

Menurut data SUPAS 2018 (Survei Penduduk Antar Sensus 2018), tercatat 14,2 persen atau 30,38 juta jiwa penduduk Indonesia menyandang disabilitas (Ismandary, 2019:2). Menurut Prakoso (2017) dalam Widyastutik & Pribadi (2019:2) disabilitas sudah tersebar hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan salah satu provinsi di Jawa yang memiliki jumlah disabilitas cukup besar adalah Jawa Timur dengan jumlah disabilitas yang mencapai 27.633 ribu jiwa.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 90 ayat 1, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial salah satunya bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya menjadi kota yang ramah disabilitas. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jombang juga berupaya dalam mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang menjadi kota ramah disabilitas dikarenakan adanya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Jombang tercatat masih terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Menurut Tukiman, Lestari, Rahayu, dan Laili (2021:736) penyandang disabilitas mental sangat perlu untuk diperhatikan, karena jika lenyah akan menyebabkan masalah publik berupa masalah sosial dan keresahan di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Jombang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 7 ayat 2 huruf c, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Jombang menjadi kota ramah disabilitas yakni dengan menyediakan pelayanan publik yang non diskriminatif, sehingga mampu mendorong penyandang disabilitas mental dalam hal kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas dapat ditingkatkan melalui kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tersebut. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 6 yakni dengan melakukan pemberdayaan sosial.

Pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996) dalam Mardikanto & Soebiato (2015:53) mengartikannya sebagai suatu upaya membangun, memotivasi, mendorong, membangkitkan dan menciptakan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Sedangkan menurut Irwin (L.Hayar Satar, 1992) dalam Rachmawati & Muhtadi, (2020:151) mengartikan pemberdayaan sebagai proses memberikan kesempatan dan menciptakan berbagai kontribusi khusus dalam bentuk wawasan, keterampilan-keterampilan, energi tertentu atau dalam bentuk memberikan perhatian kepada sesama Melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang, kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas mental dapat terwujud yakni dengan dibentuknya inovasi pelayanan publik atau program pemberdayaan. Berdasarkan informasi dari portal resmi Pemerintah Kabupaten Jombang bahwa Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang atau program *Karepe Dimesemi Bojo* adalah inovasi pelayanan publik dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan (Pemkab Jombang, 2019). Program ini mempunyai tujuan dalam meningkatkan peran serta penyandang disabilitas mental melalui aktifitas produktif serta keberfungsian sosial. Sasaran dari program ini adalah penyandang disabilitas mental yang mengalami diskriminasi (dipasung atau dikurung) dan tidak terpenuhi haknya baik dari segi fisik maupun psikisnya.

Program pemberdayaan *Karepe Dimesemi Bojo* untuk penyandang disabilitas mental ini dilaksanakan di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. *Karepe Dimesemi Bojo* ini pernah meraih prestasi sebagai finalis

terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur pada 2019. *Karepe Dimesemi Bojo* ini merupakan inovasi pelayanan publik perwujudan Kabupaten Jombang yang ramah terhadap penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental. Melalui terobosan ini Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya mengembalikan hak penyandang disabilitas mental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan data portal resmi Pemerintah Kabupaten Jombang, selain kegiatan di Posyandu Kesehatan Jiwa sebagai alternatif pengobatan rutin penyandang disabilitas mental pada setiap bulan, program *Karepe Dimesemi Bojo* mempunyai beberapa bentuk kegiatan sebagai bentuk rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan keberfungsian sosial penyandang disabilitas mental. Adapun kegiatannya adalah terapi aktivitas fisik (senam, volley, renang dan outbond), terapi aktivitas mental dan spiritual (pengajian dan hadroh), terapi aktivitas psikososial (menyanyi, bermain musik, rekreasi, dan jambore), serta memberikan pelatihan keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan minat masing-masing penyandang disabilitas mental, seperti perbengkelan sepeda motor, ternak ayam dan telur asin, menganyam rotan serta membuat tas dan keset (Pemkab Jombang, 2019).

Tujuan dari Program *Karepe Dimesemi Bojo* sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 3 yaitu, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan kemampuan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial terhadap dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengasumsikan bahwa program pemberdayaan Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang (*Karepe Dimesemi Bojo*) di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang berhasil memberikan pengaruh positif bagi penyandang disabilitas mental, yang awalnya tidak berdaya atau tidak sejahtera menjadi berdaya dan sejahtera melalui akses keterampilan, kesehatan, aktivitas produktif, sehingga program ini mendapatkan penghargaan inovasi pelayanan publik se-Jawa Timur. Menurut Hadiyanti (2018) keberhasilan suatu program tidak terlepas dari strategi pemberdayaan yang digunakan sebagai langkah tepat dalam memberdayakan masyarakat..

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pe-

neliti berupaya mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan strategi pemberdayaan dalam program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Sehingga penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah. Lokus penelitian ini dilaksanakan di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Fokus dalam menganalisis strategi pemberdayaan program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang berdasarkan teori strategi pemberdayaan menurut Suharto (2017:66) melalui 3 (tiga) aras yaitu : aras mikro, aras mezzo dan aras makro. Data hasil dari penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*.

Peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif (*interaktif model of analysis*) yang dikembangkan oleh Model Miles and Huberman (1984) dalam (Miles et al., (2014:)) yang meliputi *data collection, data condensation, data display, conclusions, drawing and verifying*. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar kredibilitas yang meliputi triangulasi data dan peningkatan pengamatan, *transferability, dependability* dan *confirmability*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari strategi yang diterapkan dalam proses sebelum dan pelaksanaan program. Maka dari itu, diperlukan pengkajian untuk menggambarkan proses pemberdayaan sehingga bisa diketahui program tersebut telah sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat atau sebaliknya. Menurut Robinson (2008) sebagaimana dikutip oleh (Yunus, 2016:5) bahwa strategi adalah kumpulan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana-rencana dalam mencapai sasaran suatu organisasi. Sedangkan pemberdayaan menurut Suharto (2017:58) mengacu pada upaya untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau kelompok masyarakat yang kurang mampu dan rentan agar memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. program "*Karepe Dimesemi Bojo*" yaitu kepanjangan dari Kawasan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang, adalah terobosan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam hal ini sebagai

*leading sector* penanganan masalah sosial yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental. Uraian penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot Kabupaten Jombang. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui strategi pemberdayaan program *Karepe Dimesemi Bojo* pada penyandang disabilitas mental di Desa Bongkot Kabupaten Jombang. Fokus pada penelitian ini meliputi : 1) Aras mikro, yang meliputi bimbingan, konseling, *crisis intervention*, dan *stress management* ; 2) Aras mezzo, yang meliputi pelatihan ; dan 3) Aras makro, yang meliputi perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat.

#### Aras Mikro

Aras mikro merupakan strategi pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara individu maupun kelompok melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Hal tersebut mempunyai tujuan utama yakni membimbing serta melatih klien atau masyarakat dalam proses pelaksanaan program *Karepe Dimesemi Bojo* (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang).

Bimbingan merupakan strategi pemberdayaan dalam aras mikro yang dipandang sebagai proses kegiatan dengan memberikan perlakuan khusus terhadap masyarakat ataupun sekelompok orang untuk memberikan solusi ataupun pelatihan kepada mereka yang membutuhkan, layaknya penyandang disabilitas mental. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Sofyan S. Willis (2009) mendefinisikan bimbingan sebagai proses bantuan terhadap seseorang yang membutuhkannya. Upaya program *Karepe Dimesemi Bojo* dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Jombang melakukan kegiatan bimbingan kepada 4 (empat) pihak di antaranya adalah bimbingan ke Kader Kesehatan Jiwa, keluarga penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yang diberdayakan dan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan, Psikolog, Perawat Jiwa di Puskesmas Dukuhklopo, Tim Keamanan Desa, dan Pemerintah Desa serta Kader Kesehatan Jiwa sebagai relawan atau pendamping penyandang disabilitas yang diberdayakan.

Adapun bimbingan yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental sudah dilakukan secara rutin, baik itu bimbingan melalui kegiatan posyandu sebagai upaya mendukung mereka agar hidup mandiri dan juga bimbingan spiritual. Begitu juga bimbingan ke Kader Kesehatan Jiwa yang sudah dilaksanakan beberapa kali oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, sehingga sudah cukup memberikan mereka pemahaman dan pengetahuan mengenai deteksi dini, cara penanganan disabilitas mental dan semacamnya. Namun, pelaksanaan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat belum sepenuhnya rutin dilakukan. Terhitung 70 persen keluarga dan masyarakat di Desa Bongkot yang sudah paham akan cara penanganan dan bersedia menerima keadaan penyandang disabilitas mental, sedangkan sisanya masih diupayakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih terdapat keluarga atau masyarakat yang kurang mendukung dan bisa menghambat kesembuhan penyandang disabilitas mental.

Konseling atau penyuluhan merupakan strategi pemberdayaan dalam aras mikro yang diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi penyandang disabilitas mental. Hal tersebut sejalan dengan Murni & Astuti (2017:285) yang mengartikan konseling sebagai suatu proses hubungan antar seorang konselor dengan penerima manfaat dalam memberikan pemahaman, mengarahkan serta menentukan suatu pilihan positif ke arah orientasi baru. Program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot ini telah rutin melaksanakan konseling pada penyandang disabilitas mental dengan memberikan mereka pertanyaan yang meliputi rutinitas di rumah, keadaan keluarga, rutinitas meminum obat serta pemberian motivasi untuk berubah dan berkembang ke arah yang positif setiap ada kegiatan posyandu di Balai Desa Bongkot. Pemberian konseling dilakukan tanpa menunggu penyandang disabilitas mental mengalami gejala yang dianggap serius. Karena penyandang disabilitas ini berbeda dengan orang normal yang bisa mengeluh dan menceritakan seluruh permasalahan di hidupnya. Sehingga dalam hal ini Perawat Jiwa dan Para Kader Kesehatan Jiwa bertugas memberikan konseling secara rutin untuk memastikan keadaan mereka.

*Stress management* atau manajemen stres yang dilakukan dalam strategi pemberdayaan program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot ini diberikan untuk mengurangi tingkat stress pada penyandang disabilitas mental. Murni &

Astuti (2017:279) mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas mental mempunyai masalah kompleks, seperti masalah kesehatan mental dan fisik, relasi sosial, pemberdayaan, dan mata pencaharian. Di lain pihak mereka mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Manajemen stress pada program *Karepe Dimesemi Bojo* ke penyandang disabilitas mental dilakukan guna mengurangi *stress*. Selain itu, dalam mengurangi stress pada penyandang disabilitas mental program *Karepe Dimesemi Bojo* mengagendakan kegiatan rekreasi dan pemberian outbond setiap 6 bulan sekali, mengadakan games kecil-kecilan, dan terapi rutin di Balai Desa Bongkot.

*Crisis Intervention* atau intervensi krisis merupakan strategi pemberdayaan dalam aras mikro yang diartikan sebagai pendekatan psikoterapi khusus untuk segera menstabilkan mereka yang berada dalam krisis. Menurut Kalamika (2020:194) aktivitas pertolongan krisis ini diberikan dalam berbagai macam pelayanan. Pelayanan ini merupakan kegiatan memfasilitasi seseorang agar dapat menyelesaikan masalahnya. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh program *Karepe Dimesemi Bojo* dalam menangani penyandang disabilitas mental yang mengalami krisis di antaranya adalah dengan diberikan obat penenang atau disuntik. Apabila ada penyandang disabilitas mental ini mengalami krisis, maka akan diberikan pelayanan berupa *home visit* agar segera ada penanganan dari perawat jiwa atau programmer jiwa sebagai seorang yang ahli dan paham dengan kejiwaan. Pada proses penanganan, perawat jiwa dibantu oleh Kader Kesehatan Jiwa serta tim keamanan desa yaitu BABINSA (Bintara Pembina Desa) dan BABINKAMTIBMAS.

Sesuai dengan hasil pembahasan penelitian terkait teori strategi pemberdayaan Suharto (2017: 66) yang menyebutkan bahwa aras mikro sebagaimana yang menjadi salah satu strategi pemberdayaan program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dilakukan dalam bentuk bimbingan, konseling, *crisis intervention*, dan *stress management* cukup berhasil dalam pemberdayaan. Hal tersebut terbukti melalui

#### **Aras Mezzo**

Aras mezzo dalam penelitian ini melihat program *Karepe Dimesemi Bojo* melakukan pemberdayaan terhadap sekelompok klien dengan pendidikan atau pelatihan (Suharto, 2017:66). Aras mezzo sebagai salah satu strategi pemberdayaan program *Karepe Dimesemi Bojo* dikatakan

berhasil jika kemampuan daripada penyandang disabilitas mental yang diberdayakan mampu berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Lebih jelasnya, tujuan utama daripada pendidikan atau pelatihan terhadap penyandang disabilitas mental ini adalah memberikan bekal agar mereka bisa hidup mandiri serta sejahtera secara ekonomi.

Hal di atas sejalan dengan Mulyanah, Argenti, & Rizki (2021:131) yang menjelaskan bahwa kegiatan keterampilan seperti pelatihan sangat penting dan diperlukan penyandang disabilitas, karena dengan adanya pelatihan keterampilan mereka bisa melatih kemampuan dan keterampilan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. Program *Karepe Dimesemi Bojo* telah melaksanakan pelatihan di antaranya adalah pelatihan membuat tas dari benang rajut, produksi telur asin, membuat keset, membuat tas dari gelas air mineral, dan membuat kripik tempe. Pelatihan pada penyandang disabilitas mental yang diberdayakan program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot memberikan dampak positif di antaranya adalah hasil produk dari keterampilan disabilitas mental serta berkembangnya pengetahuan dan keterampilan penyandang disabilitas mental. Namun, penyandang disabilitas mental yang mampu *survive* dalam kondisi ekonomi hanya ada 2 (dua) orang dari 176 klien yang diberdayakan, yakni Ibu Narsih dan Bapak Ainul Yaqin yang mampu membuat kerajinan keset dan tas dari benang rajut sampai bisa dipasarkan ke masyarakat luar. Hasil penjualan tas rajut dan keset tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membeli sepeda motor.

Sesuai dengan hasil pembahasan penelitian terkait teori aras mezzo, dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan satu bulan sekali dengan fasilitas yang kurang dan pemberian pelatihan yang masih tergolong sulit, sehingga kurang berhasil dalam pemberdayaan. Walaupun strategi pemberdayaan ini kurang berhasil, namun proses pelatihan secara keseluruhan sudah berjalan rutin sehingga memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas mental dalam hal pengetahuan dan keterampilan.

#### **Aras Makro**

Aras makro dalam penelitian ini melihat program *Karepe Dimesemi Bojo* melakukan strategi pemberdayaan dengan cara pemberdayaan, merumuskan pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat (Prihantoro, 2017). Aras makro se-

bagai salah satu strategi pemberdayaan program *Karepe Dimesemi Bojo* yang merupakan pendekatan strategi yang kompleks karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Jadi, strategi ini mengarah untuk menentukan strategi yang tepat untuk bertindak (Suharto, 2017). Aras makro sebagaimana strategi pemberdayaan ini meliputi perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik.

Perumusan kebijakan juga dapat diartikan dalam pengembangan kebijakan yang efektif dan diterima untuk mengatasi masalah yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Perumusan kebijakan ini merupakan tugas dari pemangku kepentingan dan *stakeholder*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Wadi (2017:202) bahwa berbagai peraturan dirumuskan oleh pimpinan atau badan eksekutif yang kemudian ditindaklanjuti oleh birokrasi dengan bekerja sama dengan masyarakat (*stakeholder*). Perumusan kebijakan program *Karepe Dimesemi Bojo* menghasilkan 2 (dua) keputusan, yang meliputi Surat Keputusan Inovasi Pelayanan Publik *Karepe Dimesemi Bojo* dan Surat Keputusan Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagai strategi pemberdayaan yang digunakan untuk menyukseskan jalannya program ini melalui alokasi sumber daya manusia.

Perencanaan sosial dalam penelitian ini melihat pada adanya perencanaan mulai dari pendataan atau *mapping* penyandang disabilitas mental Se-Kabupaten Jombang, pembuatan rencana program kerja atau kegiatan, anggaran dana, alokasi sumber daya manusia dari tim yang telah dibentuk agar tercapainya tujuan dari program pemberdayaan *Karepe Dimesemi Bojo*. Hal tersebut sejalan dengan Suharto (2017:72) bahwa perencanaan sosial pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan sosial *Karepe Dimesemi Bojo* sudah dilakukan secara matang sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan ketika menjadikan Desa Bongkot sebagai pilar project atau percontohan kawasan rehabilitasi penyandang disabilitas mental lainnya di Kabupaten Jombang. Ketika membuat pilar project itu Dinas Sosial Kabupaten Jombang menyiapkan perencanaan dana khusus Program *Karepe Dimesemi Bojo* yang akan diajukan ke APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun peren-

canaan sosial berupa pendataan atau *mapping* penyandang disabilitas mental yang dilakukan pada pilar project pertama terlebih dahulu. Hasil pendataan Desa Bongkot Kabupaten Jombang menghasilkan 7 (tujuh) desa yang akan diberdayakan.

Selain itu, perencanaan sosial dalam hal alokasi sumber daya manusia pada Program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara penulis bahwa perencanaan pembagian tugas yang dilakukan dalam penerapan Program *Karepe Dimesemi Bojo* dilaksanakan secara terpadu lintas sektor. Satuan kerja yang terlibat adalah Dinas Sosial Kabupaten Jombang, pekerja social, Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Peterongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, RSUD Jombang dan Puskesmas Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan beserta muspika dan jajarannya, Pemerintah Desa Bongkot, PKK Desa Bongkot, Kader Kesehatan Jiwa, dan Ikatan Perawat Kesejahteraan Jiwa Jawa Timur yang sudah mempunyai tugas masing-masing.

Kampanye merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, serta pembelokan pencapaian. Hal tersebut sejalan dengan Firmansyah & Pranawukir (2019:14) yang mengungkapkan bahwa kampanye ialah sebuah tindakan yang dikelola oleh kelompok atau organisasi yang tujuannya untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Program *Karepe Dimesemi Bojo* telah melakukan kampanye yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat sekitar dan mendapatkan dukungan ini dilaksanakan dengan mempromosikan produk telur asin dan tas yang dibuat oleh penyandang disabilitas mental. Mengenalkan produk hasil buatan penyandang disabilitas mental dengan cara dipasarkan melalui door to door, ke teman dekat, kemudian ke dunia luar di pameran serta media sosial. Pelaksanaan kampanye melalui promosi produk hasil buatan penyandang disabilitas mental membuahkan hasil yang baik karena ada tanggapan positif dan feedback dari masyarakat. Hal tersebut terbukti dari kesediaan masyarakat membeli produk telur asin maupun tas dari penyandang disabilitas mental serta mulai menerima keberadaan dan keadaan penyandang disabilitas mental khususnya masyarakat di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Aksi sosial dalam penelitian ini menitikberatkan pada upaya menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung Program *Ka-*

*repe Dimesemi Bojo*. Zulfiningrum (2021:95) menyatakan bahwa aksi sosial merupakan suatu usaha menuju perubahan atau mencegah terjadinya perubahan “terhadap praktek” atau situasi sosial yang terdapat di masyarakat. Aksi sosial dapat dilakukan melalui beragam cara seperti jalur pendidikan, propaganda, persuasi atau tekanan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik dari proses perencanaan sosial. Aksi sosial pada Program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot sudah terlaksana melalui kegiatan seperti Bantuan Sosial dan Kartu Jaminan Sosial kepada penyandang disabilitas mental yang diberdayakan. Selain itu adanya keikutsertaan penyandang disabilitas mental di kegiatan karnaval Kabupaten Jombang, sehingga hal tersebut membuat masyarakat tertarik dan mengerti bahwa penyandang disabilitas mental bisa *survive* serta mempunyai hak berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat.

*Lobbying* dalam penelitian ini menitikberatkan pada kerjasama ke instansi atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa jasa agar bisa membantu pelaksanaan aktifitas pada program *Karepe Dimesemi Bojo* di Desa Bongkot Kabupaten Jombang agar tercapainya tujuan program tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Nurwati, Antara & Made (2020:428) bahwa *lobbying* atau lobi merupakan pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang sebagai upaya mencapai tujuan. Adapun *lobbying* yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada Program *Karepe Dimesemi Bojo* yakni melobi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk meminta bantuan menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan membuat pupuk secara alami yang ditujukan kepada penyandang disabilitas mental yang diberdayakan di Desa Bongkot. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Jombang juga melobi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang untuk menghadirkan orang yang *professional* dalam membuat kerajinan tas dari benang rajut sebagai narasumber pada kegiatan pelatihan penyandang disabilitas mental di Desa Bongkot dan masih banyak lagi *lobbying* yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lainnya.

Pengorganisasian masyarakat dalam penelitian ini menitik beratkan pada pengembangan dan pembangunan kritis masyarakat yang bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang berperikemanusiaan. Menurut Afandi, Salahudin, Anshori & Susanto (2017:167) pengorganisasian masyarakat merupakan proses refleksi dari kesadaran yang muncul melalui pengalaman langsung

dengan masyarakat. Melalui identifikasi masalah, siapa saja yang terlibat dalam lingkaran masalah tersebut, sehingga mendorong kesadaran dan memberikan motivasi untuk melakukan sesuatu perubahan.

Pengorganisasian masyarakat pada Program *Karepe Dimesemi Bojo* yakni dengan menggait organisasi masyarakat di Kabupaten Jombang agar bisa ikut andil dalam mendukung program dan disabilitas mental yang diberdayakan. Beberapa pengorganisasian masyarakat yang ikut andil dalam menyukseskan Program *Karepe Dimesemi Bojo* ini di antaranya adalah Muslimat, Pemerintah Desa, PKK, Dharma Wanita, BKK, dan Kader Kesehatan Jiwa, yang tujuan utamanya adalah agar masyarakat sekitar terutama yang mengikuti organisasi masyarakat mengalami perubahan. Maksud dari perubahan tersebut adalah terwujudnya kesadaran bahwa sangat penting untuk bersikap ramah terhadap penyandang disabilitas mental di Kabupaten Jombang, khususnya di Desa Bongkot agar terwujudnya Kota Jombang yang ramah disabilitas.

Manajemen konflik dalam penelitian ini dilihat dari proses Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan jajaran *stakeholder* yang bertanggung jawab atas Program *Karepe Dimesemi Bojo* dalam mengelola konflik atau masalah dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan sehingga didapatkan resolusi yang diinginkan. Wardana, dkk (2020:635) menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan serangkaian aksi serta reaksi antara pelaku atau pihak luar dalam suatu konflik. Jadi manajemen konflik mengarah pada cara seseorang dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada dirinya maupun orang lain. Program *Karepe Dimesemi Bojo* telah melaksanakan manajemen konflik dengan sebaik mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari dari pelaksanaan musyawarah Dinas Sosial Kabupaten Jombang dengan *stakeholder* dan tim pelaksana untuk mengatasi masalah sehingga solusi bisa ditemukan serta membuat beberapa perencanaan kegiatan dengan menganalisis dampaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan, aras makro yang dilakukan dalam bentuk perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik secara matang dan terbukti nyata memberikan dampak baik pada pelaksanaan program maupun penerima manfaat, sehingga berhasil dalam pemberdayaan.

## KESIMPULAN

Strategi pemberdayaan program *Karepe Dimesemi Bojo* pada penyandang disabilitas mental

di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang yang diukur dengan 3 (tiga) aras pemberdayaan cukup berhasil dalam pemberdayaan. Beberapa fokus penelitian telah tercapai dengan baik dan telah sesuai dengan teori strategi pemberdayaan menurut Suharto (2017:66). Hal tersebut dibuktikan dengan strategi pemberdayaan pada aras mikro cukup berhasil, ditandai dengan adanya bimbingan, konseling, *crisis intervention* (intervensi krisis), dan *stress management* (manajemen stress) yang hampir keseluruhan rutin dilakukan. Walaupun ada beberapa kendala yakni dalam proses pelaksanaan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat yang terhitung 70 yang sudah paham dalam hal penanganan dan bersedia menerima keadaan penyandang disabilitas mental di sekitarnya sedangkan sisanya masih diupayakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada keluarga atau masyarakat yang bisa menghambat kesembuhan penyandang disabilitas mental karena kurangnya dukungan mereka.

Strategi pemberdayaan pada aras mezzo kurang berhasil, ditandai dengan sedikitnya jumlah penyandang disabilitas mental yang berdaya secara ekonomi dan kurangnya kepekaan mereka terkait pelatihan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Hal ini disebabkan karena pelatihan keterampilan yang diberikan masih tergolong sulit dan kurangnya fasilitas bahan keterampilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental sebagai media belajar mereka di rumah agar lebih memahami dan terbiasa membuat keterampilan. Strategi pemberdayaan pada aras makro sudah berhasil, ditandai dengan adanya perumusan kebijakan program *Karepe Dimesemi Bojo* yang sudah terlaksana dengan bukti terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang berupa SK Inovasi Pelayanan Publik *Karepe Dimesemi Bojo* dan SK Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator, matangnya perencanaan sosial, pelaksanaan kampanye guna mempengaruhi dan mendapatkan dukungan masyarakat Kabupaten Jombang, aksi sosial yang dilakukan untuk memperlihatkan ke masyarakat luar bahwa disabilitas mental juga bisa *survive*, pelaksanaan *lobbying* yang sudah baik sehingga terjalinnya kerjasama antar instansi dalam mendukung program ini, pengorganisasian masyarakat yang telah dilaksanakan agar terciptanya kesadaran masyarakat akan ramah terhadap disabilitas mental, dan manajemen konflik sudah dipraktikkan sehingga mampu mengatasi masalah yang ada dalam program *Karepe Dimesemi Bojo*. terbukti nyata memberikan dampak baik pada pelaksanaan program

maupun penerima manfaat, sehingga berhasil dalam pemberdayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam, (2017).
- Firmansyah, F., & Pranawukir, I. (2019). Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Implementasi Kampanye DPAPMK Pada Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 04(01), 12–23.
- Hadiyanti, P. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif di PKBM Rawasari Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(April).
- Hayati, S., & Surya, M. A. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 16. <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6893>
- Ismandary, F. (2019). *Situasi Disabilitas*. Pusat Data dan Informasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 1 (2016).
- Jombang, P. (2019). *Finalis Terbaik KOVABLIK Jatim 2019 “KAREPE DIMESEMI BOJO.”* Portal Resmi Kabupaten Jombang.
- Kalamika, A. M. (2020). Model Intervensi Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Problematika Perkuliahan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 17(2), 178–198. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2020.172-03>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. ALFABETA, CV.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Mulyanah, Argenti, G., & Rizki, M. F. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. *Journal of Government and Political Studies*, 4(1).
- Murni, R., & Astuti, M. (2017). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Sosial Rumah Kita. *Sosio Informa*, 1(03), 278–292.
- Nurwati, Antara, M., & Jokolelono, E. (2020). Eksistensi Pemberdayaan Peternak Penerima



- Bantuan di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. *Katalogis*, 8(4), 423–435.
- Organization, W. H. (2011). World Report On Disability. In *World Health Organization*. Malta. [www.who.int/about/licensing/copyright\\_form/en/index.html](http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html)
- Prihantoro, S. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo). *Journal Of Non Formal Education and Community Empowerment*, 2(2), 15–21.
- Putra, D. A., Rusmanja, R., Rusydany, M. H., & Wibawani, S. (2020). Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Menuju Sustainable Development Goals di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 7–13.
- Rachmawati, S., & Muhtadi. (2020). Strategi Pemberdayaan Soft Skills Penyandang Disabilitas di Deaf Cafe and Car Wash Cinere Depok Jawa Barat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 148–167.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Tukiman, Lestari, T. P., Rahayu, E. P., & Laili, R. A. N. (2021). Pemberdayaan Disabilitas Mental Melalui Program Karepe Dimesemi Bojo di Kabupaten Jombang. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5).
- Wadi, H. (2017). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 06(02), 195–224.
- Wardana, D. J., Fauziyah, N., Rahim, A. R., & Sukaris. (2020). Manajemen Konflik dengan Self-Awareness. *Journal of Community Service*, 2(4), 632–639.
- Widyastutik, C., & Pribadi, F. (2019). Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 105–112.
- Yunus, E. (2016). Manajemen Strategis. In *Manajemen Strategis*. ANDI.
- Zulfiningrum, R. (2021). Aksi Sosial Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Brebes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. ... : *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 01(01), 89–106. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/download/859/468>